

BAB IV

KESIMPULAN dan SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis secara menyeluruh pada level teks dan konteks di masing-masing Koran, peneliti kemudian membandingkan temuan-temuan tersebut khususnya mengenai pemingkakan opini (pendapat) narasumber dalam berita – berita *headline*. Seperti telah dipaparkan pada bagian level teks, peneliti telah mengelompokkan narasumber-narasumber (pelantun wacana) dalam pemberitaan *KR* dan *Bernas Jogja* menjadi tujuh kelompok, yakni anggota DPRD DIY, anggota DPR RI, Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Sultan HB X, pakar / pengamat, dan aktivis organisasi masyarakat. Pada bagian inilah peneliti membandingkan kembali hasil pemingkakan *KR* dan *Bernas Jogja* terhadap opini (pendapat) narasumber yang terungkap dalam berita. Namun perbandingan ini berbeda dengan perbandingan di level teks karena telah dilengkapi dengan hasil analisis pada tataran konteks. Selain itu, hasil perbandingan inilah yang kemudian akan menjadi kesimpulan penelitian, yang menjawab permasalahan atas penelitian ini. Dengan pemaparan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal guna menjawab rumusan permasalahan pada Bab I, yaitu :

1. *KR* cenderung mengangkat pendapat anggota DPRD DIY karena memiliki kewenangan serta akses untuk memperjuangkan keistimewaan DIY sehingga dinilai berpotensi sebagai narasumber yang layak, kredibel, dan proporsional dalam menanggapi wacana polemik jabatan gubernur DIY. Sedangkan *Bernas Jogja* bersikap sebaliknya, yakni tidak begitu menyoroti opini anggota DPRD

DIY karena menganggap kewenangan kebijakan soal jabatan gubernur DIY ataupun keistimewaan DIY berada di pemerintah pusat (DPR RI dan presiden), dan bukan daerah. Anggota DPRD DIY juga dinilai kurang obyektif dalam berpendapat karena pada akhirnya berbicara atas nama partai sehingga terkesan mewakili kepentingan tertentu. Maka dari itu, *Bernas Jogja* cenderung mengangkat pendapat dari para pakar / pengamat mengenai polemik jabatan gubernur karena dinilai lebih netral dan tidak memiliki kepentingan atas polemik yang terjadi.

2. *KR* memiliki kriteria yang ketat mengenai pemilihan narasumber yang dimunculkan pada berita *headline* soal polemik pengisian jabatan gubernur DIY. Tidak semua orang bisa berbicara atau diangkat pernyataannya dalam berita *headline*, karena *KR* sangat mempertimbangkan latar belakang pendidikan, reputasi, institusi maupun profesi narasumber agar sesuai dengan kriteria mereka, yakni kredibel (dapat dipertanggungjawabkan pernyataannya) dan kapabel (sesuai kapasitas). Minimal narasumber yang dipilih adalah ketua atau koordinator paguyuban masyarakat (seperti Ismaya, Gerakan Rakyat Yogyakarta), tapi tidak bisa jika hanya seorang individu (masyarakat awam) tanpa atribut ataupun kompetensi seperti pakar / pengamat. *KR* menilai pernyataan narasumber pada berita *headline* akan menjadi pegangan serta referensi bagi pihak lain untuk berpendapat sehingga narasumber yang disajikan tidak bisa sembarangan.

Sementara, *Bernas Jogja* cenderung menyajikan narasumber secara merata dari berbagai kelompok masyarakat demi memperoleh pendapat yang beragam mengenai polemik pengisian jabatan gubernur DIY. Sedangkan mengenai kriteria

pemilihan narasumber tidak seketat *KR*, namun yang terutama adalah narasumber tersebut tidak bermasalah atau memiliki catatan buruk. Bagi *Bernas Jogja* selama narasumber yang bersangkutan membahas mengenai polemik jabatan gubernur DIY maka latar belakang pendidikan, profesi, ataupun atribut lainnya dapat dikesampingkan. Meski pihak redaksi *Bernas Jogja* menilai narasumber yang berada pada suatu institusi memiliki nilai berita lebih kuat dibandingkan masyarakat awam yang tidak dikenal khalayak.

3. *KR* lebih menempatkan pendapat narasumber (yang terdiri dari 7 kelompok masyarakat) sebagai pendorong terbitnya RUU Keistimewaan DIY yang sesuai dengan aspirasi mayoritas rakyat DIY. Hal itu terlihat melalui berita-berita mengenai penolakan perpanjangan jabatan gubernur DIY selama 2 tahun oleh DPRD DIY karena tidak sesuai aspirasi rakyat DIY, kemudian adanya perdebatan mengenai payung hukum serta landasan hukum perpanjangan jabatan gubernur DIY oleh para pakar politik serta pengamat keistimewaan DIY. Semua pendapat narasumber tersebut dikemas sedemikian rupa oleh redaksi *KR* sehingga menghasilkan berita yang tetap menyuarakan aspirasi masyarakat DIY yang menginginkan penetapan gubernur DIY.

Bernas Jogja lebih memanfaatkan pendapat para narasumber tersebut untuk memperjelas dan mempertegas sikapnya yang mendukung penetapan gubernur DIY. Dengan ditampilkannya berbagai narasumber yang disajikan pada berita *headline* maka diharapkan masyarakat pembaca dapat semakin diyakinkan bahwa *Bernas Jogja* mendukung dan tetap memperjuangkan aspirasi penetapan gubernur. Hal itu juga diperkuat dengan adanya pengakuan dari Sholihul Hadi (wartawan

senior dan asisten redaktur *Bernas Jogja*) bahwa pernyataan narasumber yang mendukung pemilihan gubernur diberikan porsi yang sedikit dan dibuat agar tidak secara gamblang menyatakan dukungannya terhadap pemilihan gubernur DIY (dikaburkan mengenai fakta ataupun opininya).

4. Berdasarkan penelusuran data selama penelitian dan wawancara dengan pihak redaksi, peneliti menyimpulkan bahwa sikap dan frame *KR* yang mendorong keistimewaan DIY dengan penetapan gubernur DIY, tidak lepas dari pengaruh ideologi serta kebijakan redaksi terhadap isi dari media tersebut, yakni mengutamakan kepentingan publik. Selain itu ada misi dari redaksi *KR* yang berupaya mendorong solusi atau jalan keluar bagi keistimewaan DIY yang sesuai aspirasi rakyat DIY.

Sementara di pihak redaksi *Bernas Jogja* peneliti tidak menemukan adanya kedekatan ataupun petinggi yang memiliki kedekatan dengan Sultan HB X sehingga peneliti menyimpulkan bahwa sikap dan frame *Bernas Jogja* yang cenderung pada aspirasi penetapan gubernur DIY lebih dikarenakan orientasinya sebagai koran yang pro bisnis, yakni mengutamakan berita-berita yang layak jual dan menarik pembeli. Kebetulan pada jangka waktu itu, polemik mengenai pengisian jabatan gubernur DIY menjadi topik hangat sehingga diyakini mampu menarik banyak pembeli. Prinsip pemberitaan yang pro bisnis tersebut makin diperkuat dengan adanya pengakuan dari Robertus Arianto, wartawan *Bernas Jogja* mengenai adanya keberpihakan terhadap rekan bisnis atau pengiklan.

Caranya adalah tidak memberitakan kasus yang menimpa perusahaan pengiklan atau rekan bisnis karena dinilai mampu mengurangi pendapatan *Bernas*

Jogja dalam hal iklan. Bahkan jika wartawan tetap meliput, sudah dipastikan berita tersebut tidak akan terbit. Sugeng (Redaktur Pelaksana *Bernas Jogja*) juga menjelaskan bahwa sejak berdiri sendiri, pihak redaksinya memang berorientasi pro bisnis, terutama pada topik atau berita bisnis sehingga kebanyakan berita bisnisnya seperti advertorial karena membicarakan seputar produk suatu perusahaan. Dia juga mengakui bahwa berita bisnis yang diliput sebagian besar adalah yang positif dan sebisa mungkin dapat menghasilkan iklan.

Adanya kebijakan semacam itulah yang kemudian meyakinkan peneliti bahwa memang prinsip dan orientasi *Bernas Jogja* yang pro bisnis, menjadi patokan serta pedoman para wartawan dan redaksi dalam menghasilkan suatu berita. Hal itu pulalah yang menjadi perbedaan besar antara redaksi *KR* dengan *Bernas Jogja*. Pemberitaan *KR* terpengaruh atas adanya kepemilikan keluarga Samawi yang dekat dengan Sultan HB X, bahkan selalu menjadi orang yang berada di garis depan untuk mempertahankan Sultan. Meski demikian, peneliti tetap melihat adanya keberimbangan dalam pemberitaan *KR*, dalam artian aspirasi yang mendukung pemilihan gubernur DIY tetap diakomodasi, namun tidak dalam skala besar. Sementara pemberitaan *Bernas Jogja* murni bisnis sehingga akan selalu mengikuti kemauan pembaca. Dalam kasus ini, mayoritas masyarakat DIY masih menginginkan Sultan HB X sebagai gubernur DIY sehingga pemberitaan *Bernas Jogja* juga mendukung penetapan gubernur DIY.

5. Dengan ketatnya kriteria pemilihan narasumber pada berita *headline* di kedua koran lokal, maka peneliti mengelompokkan pihak-pihak yang memiliki akses langsung pada media dan dianggap layak sebagai narasumber yaitu aktor

politik (anggota DPR RI, anggota DPRD DIY, pengurus partai, koordinator aksi, koordinator paguyuban masyarakat), aparat pemerintah (presiden, Menteri Dalam Negeri, pemerintah provinsi, Sultan HB X selaku gubernur DIY), kelompok profesi (praktisi hukum), dan kelompok intelektual (pengamat politik, budayawan, seniman, dosen).

Sementara masyarakat awam yang tidak memiliki atribut seperti jabatan atau kompetensi untuk berpendapat soal polemik jabatan gubernur DIY, aspirasinya lebih dimunculkan pada kolom 'akar rumput', kolom surat pembaca, ataupun kolom opini, dan tidak sebagai narasumber pada berita *headline*.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang peneliti harapkan bisa menjadi masukan bagi redaksi *KR* maupun *Bernas Jogja* khususnya dalam hal pemberitaan. Meskipun saran ini tidak sempurna namun diharapkan dapat menjadi catatan bagi kedua redaksi koran dalam pengembangan berita serta dalam pengembangan penelitian yang serupa. Adapun saran yang dimaksud sebagai berikut :

1. Peneliti merasakan penelitian ini masih memiliki banyak kelemahan khususnya dalam proses penggalian data di lapangan, karena peneliti menemui beberapa kesulitan, seperti kurang berhasil mengorek informasi dari narasumber (subyek penelitian). Karena informasi yang kurang lengkap atau seadanya, peneliti harus mengulang kembali atau melakukan wawancara tambahan dengan narasumber yang bersangkutan dan terkadang jawabannya kurang memuaskan akibat mengalami kejenuhan selama proses wawancara berlangsung. Untuk itu,

peneliti menyarankan agar pada penelitian selanjutnya, daftar pertanyaan disusun sedetil mungkin serta perlu ditandai bagian mana saja yang sudah terjawab dan yang belum terjawab. Penandaan pada daftar pertanyaan akan bermanfaat sebagai alat kontrol jalannya wawancara. Jika dirasa jawaban subyek penelitian terlalu panjang dan keluar jalur, maka dengan adanya penandaan di daftar pertanyaan, peneliti dapat mengarahkan kembali pada konteks yang dimaksudkan diawal. Selain itu diperlukan teknik ataupun ketrampilan untuk membuat suasana wawancara menjadi nyaman serta mampu mendorong subyek penelitian memberikan informasi secara lengkap dan terbuka.

2. Melanjutkan saran pertama, diperlukan kegigihan serta semangat yang tinggi dari peneliti untuk terus mengejar subyek penelitian hingga memberikan jawaban yang memuaskan. Untuk itu, disarankan agar peneliti selanjutnya mampu memotivasi diri secara positif sehingga pantang menyerah meski menghadapi masalah seperti wartawan (subyek penelitian) yang ingin diwawancarai, sulit ditemui atau tidak bersedia melakukan wawancara tatap muka. Maka dari itu, diperlukan pula strategi serta inisiatif dari peneliti agar wartawan (subyek penelitian) yang akan diwawancara tetap bersedia memberikan informasi, misalnya melalui tanya jawab via *email* atau *chatting*. Hal-hal itulah yang kiranya bisa disiapkan oleh peneliti selanjutnya sebelum turun ke lapangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak sesuai rencana.

3. Berdasarkan eksplorasi peneliti selama proses wawancara dengan pihak redaksi serta hasil observasi pada teks-teks berita, peneliti belum menemukan adanya survei atau jajak pendapat yang dilakukan oleh *KR* maupun *Bernas Jogja* mengenai pendapat masyarakat DIY soal pengisian jabatan gubernur DIY. Padahal menurut peneliti, hasil jajak pendapat atau survei tersebut dapat menjadi nilai tambah pada media yang bersangkutan, karena dapat menjadi bukti kesungguhan koran lokal dalam mengawal wacana pengisian jabatan gubernur DIY, sekaligus dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Untuk itu, peneliti menyarankan *KR* dan *Bernas Jogja* ke depannya bisa mengadakan semacam *polling* pendapat atau semacam survei acak pada masyarakat mengenai pendapat soal pengisian jabatan gubernur DIY seperti yang pernah dilakukan oleh Litbang *Kompas Jogja* pada September dan Oktober 2008 melalui telepon secara acak. Hasil survei tersebut juga dapat menjadi gambaran terkini (*update*) mengenai opini (pendapat) masyarakat DIY, apakah mayoritas masih menghendaki penetapan gubernur atau sudah beralih pada pemilihan gubernur.
4. Untuk memperoleh gambaran yang komplit mengenai sikap media lokal terhadap wacana pengisian jabatan gubernur DIY, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan membandingkan koran lokal lainnya seperti *Radar Jogja*, *Kompas*, dan *Harian Jogja*. Penelitian selanjutnya juga dapat dikembangkan dengan membandingkan sikap koran lokal dengan koran nasional. Karena penelitian ini telah menggunakan model framing Pan dan Kosicki, maka penelitian selanjutnya bisa menggunakan model analisis framing yang berbeda

seperti model framing dari Robert Entman, Murray, ataupun milik William Gamson. Penelitian ini juga masih bisa dikembangkan, yakni tidak hanya meneliti konstruksi realitas media pada berita, namun meneliti peran media massa dalam pembentukan ataupun pengarahannya opini / sikap masyarakat terhadap wacana polemik jabatan gubernur DIY.

